

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2003.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Prenada Media Group, 2006.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Manik, Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta : CV Mandar Maju, 2012.
- Muljadi, Kartini, “*Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*” dalam Rudhy A. Lontoh et.al., ed., *Penyelesaian Utang-Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni, 2001.
- Pudyomoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*: Yogyakarta : Andi, 2002.
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada, 2008.
- Sihombing, Jonker, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Jakarta: Ref Publisher, 2013.
- Situmorang, Victor dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta : Grafiti, 2009

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Rafika Aditama, 2011.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empat, 2011.

Subhan, M., *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2000.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Tejaningsih, Titik, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembereasan Harta Pailit*. Yogyakarta : UII Press, 2016)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

Peraturan menteri keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018.

Internet

<https://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>

<https://www.pajak.go.id/index.php/id/tugas-dan-fungsi-0>

<https://bisnis.tempo.co/read/1033041/aset-kreditur-cipaganti-tak-jadi-dikuasai-kantor-pajak/full&view=ok>

